

PENERAPAN SIPD DALAM MENGELOLA EFISIENSI ADMINISTRASI SPM DI BIDANG PERBENDAHARAAN BKAD KOTA MEDAN

Putri Valentina Saragih¹, Jessica Rodearni Sipayung², Sintya Triselpeni Sinaga³, Vera A.R Pasaribu⁴
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas HKBP Nommensen Medan
e-mail: putri.valentina@student.uhn.ac.id¹, jessica.rodearni@student.uhn.ac.id²,
sintya.triselpeni@student.uhn.ac.id³, verapasaribu@uhn.ac.id

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

The implementation of the Local Government Information System (SIPD) is a form of commitment by the Medan City Government to realize transparent, efficient, and accountable regional financial management, as mandated by Law Number 23 of 2014. SIPD is used as an integrated platform that connects all financial management processes, from planning, budgeting, administration, to reporting. Through this Community Service (PKM) activity, it was understood that SIPD has played an important role in supporting the acceleration of the Payment Order (SPM) administration process in the Treasury Division of BKAD Medan City. This system facilitates data entry, information consistency, and real-time monitoring of budget realization. The implementation of SIPD also strengthens public information disclosure because every stage of financial management is recorded digitally and can be monitored more systematically. The results of the activity show that SIPD is capable of improving the quality of financial administration services, facilitating cash budget preparation, and strengthening accountability mechanisms in APBD management. Overall, the implementation of SIPD in the Medan City Government illustrates a concrete step in strengthening modern, effective governance that is oriented towards improving the quality of public services.

Keyword: SIPD, SPM, Efficiency

ABSTRAK

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. SIPD digunakan sebagai platform terpadu yang menghubungkan seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam penginputan data, konsistensi informasi, serta pemantauan realisasi anggaran secara real time. Implementasi SIPD juga memperkuat keterbukaan informasi publik karena setiap tahapan pengelolaan keuangan terekam secara digital dan dapat diawasi dengan lebih sistematis. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, diperoleh pemahaman bahwa SIPD telah berperan penting dalam mendukung percepatan proses administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) di Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SIPD mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi keuangan, mempermudah penyusunan anggaran kas, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Secara keseluruhan, penerapan SIPD di Pemerintah Kota Medan menggambarkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keyword: SIPD, SPM, Efisiensi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong transformasi digital melalui penerapan sistem berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik. Salah satu inovasi penting dalam mendukung transformasi tersebut adalah *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (SIPD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD berfungsi sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara elektronik (Imam et al., 2023).

Meskipun demikian, implementasi SIPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, khususnya di Bidang Perbendaharaan, belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan kendala seperti keterlambatan penginputan data, gangguan jaringan, serta keterbatasan pemahaman aparaturnya dalam mengoperasikan sistem. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efisiensi administrasi dan keterlambatan proses pencairan anggaran. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Asri et al., 2025) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD di sejumlah daerah di Indonesia masih terkendala kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur digital.

Bidang Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar pencairan anggaran. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikan SIPD secara tepat dan efisien. (Sofian & Agustiningtyas, 2023) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam efektivitas penerapan sistem berbasis digital di pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparaturnya Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan dalam penggunaan SIPD. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis, aparaturnya diharapkan mampu memahami alur penggunaan sistem secara menyeluruh, mempercepat proses administrasi SPM, serta meminimalkan kesalahan dalam penyusunan dokumen keuangan. Penerapan SIPD secara optimal diharapkan dapat memperkuat prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode sosialisasi untuk melihat sejauh mana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mengelola Efisiensi Administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) di bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan. Dengan menggunakan metode sosialisasi yang terstruktur dan berbasis data lapangan, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi publik mengenai praktik pemerintahan digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel. Metode sosialisasi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi yang bersifat akademik dan praktis mengenai implementasi SIPD, termasuk landasan regulasi, fungsi sistem, serta kontribusinya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, PKM ini memanfaatkan hasil observasi lapangan dan data yang relevan dari Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar empiris yang akurat. Di samping itu, pendekatan komunikasi partisipatif digunakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memahami peran SIPD dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Materi edukasi disusun dalam format yang mudah dipahami, namun tetap memenuhi kaidah akademik sesuai karakteristik kegiatan pengabdian.

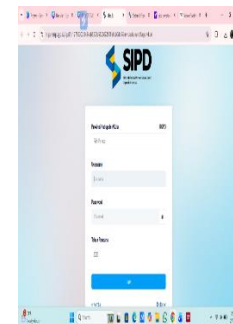
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketentuan tersebut dipertegas kembali melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang menjadikan SIPD sebagai sistem terpadu dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah. Melalui regulasi ini, SIPD menjadi instrumen resmi pemerintah yang wajib digunakan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance.

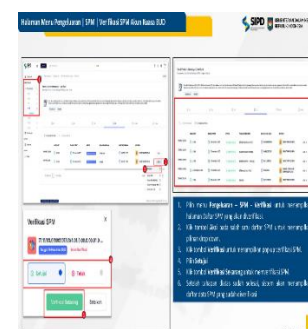
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai pusat pengolahan informasi yang membantu perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, anggaran, tindak lanjut pelaksanaan, hingga pelaporan akhir kegiatan. Sistem ini memungkinkan pemerintah mengelola informasi secara sistematis, konsisten, dan terstandardisasi, sehingga mendukung proses administrasi yang lebih cepat dan tepat sasaran. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Salain & Wedena, 2023).



Gambar 1. Tampilan Utama Sistem Informasi Pemerintah Daerah



Gambar 2. Tampilan Log-in SIPD



Gambar 3. Halaman Menu Pengeluaran|SPM|Verifikasi

Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), efisiensi administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) di terapkan melalui digitalisasi, integrasi data, dan otomatisasi proses. Artinya, pengelolaan SPM tidak lagi bergantung pada proses manual dan terpisah, tetapi dilakukan di satu sistem terpadu yang saling terhubung dari terhadap perencanaan anggaran hingga pencairan dana.

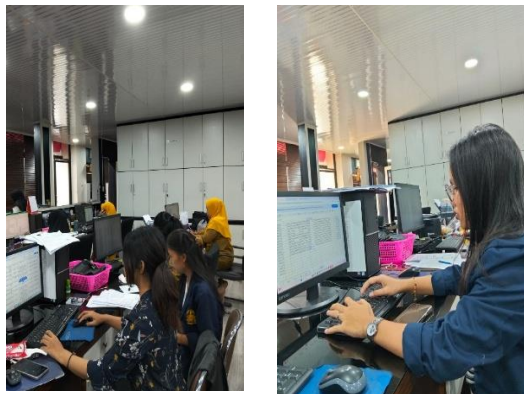
Secara umum, SIPD menerapkan efisiensi dengan cara:

1. Memutuskan seluruh data keuangan atau DPA, RKA, Kontrak, SPJ dan SPM) dalam satu aplikasi.

2. Menghilangkan penginputan berulang, karena data SPM otomatis menarik data dari dokumen anggaran yang sudah ada.

3. Menyediakan validasi otomatis, sehingga kesalahan administrasi dapat terdeteksi sejak awal sebelum SPM diproses lebih lanjut. Dengan begitu waktu penyelesaian SPM lebih singkat, beban kerja administrasi berkurang, dan potensi kesalahan manual dapat ditekan.

Tujuan utama dari SIPD adalah untuk menyinkronkan tahapan perencanaan dan penganggaran diseluruh level pemerintahan secara digital dan akurat. Sistem ini memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara sistematis, terdokumentasi dan mudah diaudit (Namora Lubis et al., 2025). Selain itu, SIPD bertujuan menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur, berbasis data, dan terintegrasi antar-perangkat daerah. Melalui sistem ini, keputusan pemerintah dapat dibuat berdasarkan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 4. Pengisian Surat Perintah Membayar (SPM)

Administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui sistem digital yang terintegrasi. Efisiensi tersebut terlihat dari penyederhanaan prosedur administrasi, percepatan proses verifikasi, serta standarisasi alur kerja antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Pengajuan SPM dilakukan secara elektronik oleh OPD melalui SIPD dengan mengunggah dokumen pendukung dalam sistem. Mekanisme ini mengurangi penggunaan berkas fisik, mempercepat pengiriman dokumen, dan memungkinkan pelacakan status SPM secara real time. Selanjutnya, BKAD melakukan verifikasi administrasi melalui fitur validasi otomatis yang menyesuaikan data SPM dengan DPA, pagu anggaran, dan kode rekening. Sistem notifikasi membantu mempercepat perbaikan apabila terjadi ketidaksesuaian, sehingga proses verifikasi menjadi lebih singkat dan akurat.

SIPD juga menerapkan otomatisasi dan standarisasi format administrasi SPM sesuai ketentuan yang berlaku. Keseragaman prosedur antar OPD memudahkan pengawasan dan pengendalian oleh BKAD. Selain itu, fitur pemantauan real time memungkinkan seluruh tahapan SPM dipantau secara transparan tanpa komunikasi manual yang berlebihan. Dengan demikian, administrasi SPM dalam SIPD berlangsung lebih cepat, tertib, dan efisien.

Melalui kegiatan ini masyarakat mendapatkan pemahaman bahwa pemerintah telah menerapkan SIPD secara baik dan profesional, khususnya dalam pengelolaan administrasi SPM. Hal ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, serta memperluas keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Pemanfaatan SIPD juga mendorong terbangunnya kepercayaan publik karena masyarakat dapat melihat bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terstruktur dan digital.

Secara keseluruhan, penerapan SIPD memberi kekuatan besar bagi pemerintah daerah dalam mengontrol seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, Pemerintah Kota Medan dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintah bukan hanya meningkatkan kualitas administrasi internal, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik yang modern dan terpercaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan di Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam administrasi Surat Perintah Membayar (SPM). SIPD mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan secara digital dan terstruktur.

Pemanfaatan SIPD terbukti memberikan kemudahan bagi aparatur dalam proses penginputan dan verifikasi data, mempercepat alur administrasi SPM, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Penerapan SIPD juga berkontribusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik karena seluruh proses keuangan terdokumentasi secara elektronik dan dapat diawasi secara sistematis.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam PKM ini, aparatur serta masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan manfaat SIPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern. Secara keseluruhan, penerapan SIPD di Pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

administrasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Penerapan SIPD juga berkontribusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik karena seluruh proses keuangan terdokumentasi secara elektronik dan dapat diawasi secara sistematis.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam PKM ini, aparatur serta masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik

mengenai fungsi dan manfaat SIPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern. Secara keseluruhan, penerapan SIPD di Pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, J. D., Lestari, E. B., Agustina, I., Zulkarnaen, A., & Risky, M. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Kecamatan Melalui Pendampingan SIPD RI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 111–121.
<https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.250>
- Imam, I. A. F., Novita, R., Ningsih, R. A., Fiernanda, V., Sari, S. S., & Usmaniyah, W. (2023). Aktivitas Pengisian Sistem Informasi PImam, I. A. F., Novita, R., Ningsih, R. A., Fiernanda, V., Sari, S. S., & Usmaniyah, W. (2023). Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Altifani Pe. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 545–552.
<https://doi.org/10.59395/altifani.v3i4.448>
- Namora Lubis, A. K., Sembiring, Y., Dewi Martha, F. Y., & Ilham, R. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).
<https://doi.org/10.33753/ijse.v6i1.212>
- Salain, P. P. P., & Wedena, I. K. J. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 453–458.
- Sofian, O. D., & Agustiningtyas, E. (2023). Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Guna Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Batu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 34–44.



<https://jpkemas.stiamalang.ac.id/index.php/Jpkemas/article/view/9%0Ahttps://jpkemas.stiamalang.ac.id/index.php/Jpkemas/article/download/9/12>